



Sarankan Gandeng Pihak Ketiga

Tangani Pengelolaan Tumpukan Sampah di TPST Piyungan

JOGJA – Buruknya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan terus menuai sorotan. Kali ini datang dari Komisi C DPRD DIJ. Komisi yang membidangi pengawasan lingkungan ini menyarankan pemprov menggandeng pihak ketiga dalam pendauran sampah. Pertimbangannya, kapasitas TPST yang beroperasi mulai medio 90-an tersebut *overload*. Di sisi lain, hingga sekarang belum ada solusi penuntasan yang ditawarkan.

Anggota Komisi C DPRD DIJ Huda Tri Yudianta menilai, belum ada solusi jitu dalam mengatasi timbunan sampah di TPST Piyungan. Meskipun berbagai teknologi pendauran sampah sebenarnya sudah tersedia. Hanya, biaya penggunaan teknologi pendauran sampah itu memang tidak murah. Mengacu kajian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Energi Sumber Daya Mineral (PUP EDSM) beserta UGM pada 2016, butuh sedikitnya anggaran Rp 300 miliar.

"Takutnya sudah habis Rp 300 miliar ternyata gagal. *Kan* bisa jadi masalah," kata Huda saat dihubungi kemarin (10/5).

Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, pengelolaan sampah bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Seperti yang dilakukan Pemkot Bekasi. Pihak ketiga menjadikan sampah sebagai sumber energi. Bentuknya pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS).

Dengan strategi ini pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran. Sebaliknya, justru mendapatkan keuntungan dari penjualan energi. "Pemusnahan sampah ini bisa jadi bisnis," ucapnya.

Politikus PKS ini melihat sampah di TPST Piyungan berpotensi diubah menjadi energi. Apalagi, kandungan sampah yang bisa menghasilkan energi di TPST Piyungan besarnya mencapai 70 persen. Sisanya berupa residu yang bisa dijadikan kompos.

Bila kerja sama dibuka, politikus dari Dapil Sleman ini optimis persoalan sampah bisa terpecahkan.

"Sekarang ini ada masalah tapi tidak ada solusi. Kita lakukan *gambling* kebijakan. Yang penting ada arahnya untuk kesana," tandasnya.

Terpisah, Plh Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan (PISAMP) Dinas PUP ESDM DIJ Agung Satrio mengungkapkan, ada arah menuju kerja sama dengan pihak ketiga. Hal tersebut ditandai dengan perintisan program kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBUB).

"Tahapan itu untuk menghindari risiko bila nanti kerjasama macet di tengah jalan," paparnya.

Diakui, proses untuk mencapai kerja sama sangat panjang. Sebab, ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui. Yakni, diskusi publik. Itu untuk mengetahui kelayakan kerja sama dari pakar. Belum lagi tahapan penyusunan laporan pendahuluan untuk masalah sampah Piyungan.

"Standar Kementerian PU (Pekerjaan Umum) memang seperti itu. Namun akhirnya nanti yang mengelola tetap diletakkan," jelasnya.

Seperti diketahui, sejak melebihi kapasitas pada 2012, pengelolaan TPST Piyungan menjadi tidak optimal. Praktis pengelolaan sampah hanya mengandalkan sistem *open dumping*. Di mana berbagai sampah yang diangkut truk dibuang begitu saja di area TPST.

Kendati begitu, Satrio mengaku belum ada kajian terbaru mengenai berapa jumlah sampah yang kini menumpuk di TPST Piyungan.

"Kami perkiraan jumlahnya tiga kali lipat dari kapasitas normal 2,4 juta ton," katanya. (bhn/zam/by)

Instansi
1. DLH
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005